

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kotawaringin Timur adalah nama salah satu kota dari provinsi Kalimantan Tengah

B. Penyajian Data

Penyajian data ini merupakan hasil dari penelitian di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumenter. Pengumpulan data ini dilaksanakan secara bersama dan telah dilaksanakan dengan sebaiknya.

1. Prespektif DPD Golongan Karya (GOLKAR) tentang Etika Islam Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah

Adapun hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2013 kepada H. Supriadi, MT.S.Sos sebagai ketua DPD Golkar Kotawaringin Timur Propinsi Kal-Teng tentang konsep etika politik perspektif DPD GOLKAR Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah yaitu Beliau menyatakan bahwa DPD partai Golkar mempunyai Yang namanya Panca Sukses Golkar yaitu yang terdiri dari: Sukses Organisasi, Sukses Kaderisasi, Sukses Pemilihan Kepala Daerah, Sukses Pembangunan, Berkaitan dengan panca sukses Golkar di atas sudah pasti partai golkar dalam program-programnya sendiri

mengutamakan untuk kemajuan daerah dan SDM Nya. Para kader golkar ditekankan harus bisa menjaga amanah masyarakat dan bisa mengimplementasikan kepada kepala daerah dan masyarakat apa yang sudah diorganisasikan praksi partai golkar. Dalam hal etika berpolitik partai Golkar, semua itu berkaitan dengan program-program partai Golkar itu sendiri dan tetap menjaga amanah dari masyarakat setiap keputusan-keputusan organisasi di implementasikan melalui praksi Partai Golkar. Sejauh ini pelaksanaan etika politik DPD Golkar Kotim terhadap Kepala Daerah berjalan dengan baik . hal ini terbukti dengan DPD Golkar menjadi pengawal Pemerintah secara professional dan proporsional.

Khususnya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat partai Golkar akan mendukung sepenuhnya. akan tetapi, bila untuk kepentingan kelompok atau golongan, maka akan dihadang. karena partai Golkar hanya akan mendukung program-program Pemerintah yang berpihak pada rakyat saja. Untuk masyarakat sejauh ini pelaksanaan etika politik partai golkar selalu memprioritaskan suara golkar dengan suara masyarakat itu satu. Contoh etika politik yang sudah dilakukan Partai Golkar Kotim dengan Kepala Daerah,yaitu dalam rangka membangun koordinasi dan komonikasi berkaitan dengan Pemerintah mengimlimentasikan program-program pembangunan daerah. Seiring sejalan tetapi tetap partai Golkar kritis tentang kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat dan pembagunan daerah tersebut.

Sedangkan contoh etika politik yang sudah dilakukan DPD Partai Golkar Kotim dengan masyarakat Golkar selalu Pro rakyat dan selalu memprioritaskan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masyarakat contohnya melalui kader-kader dan praksi partai Golkar sering melakukan kegiatan Golkar Cap, Bakti sosial, kunjungan kader Golkar ke panti-panti asuhan dan memberikan bantuan-bantuan untuk masyarakat yang mendapat bencana.

Hasil wawancara pada tanggal 27 Mei 2013 kepada bapak Dewin Marang SH selaku Ketua Bidang pemenangan Pemilu DPD Golkar Kotawaringin Timur Propinsi Kal-Teng. Adapun hasil wawancara dengan para responden yang mana membahas tentang etika politik perspektif DPD GOLKAR Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah yaitu: Beliau menyatakan bahwa DPD partai Golkar mempunyai Yang namanya Panca Sukses Golkar yaitu yang terdiri dari : Beliau menyatakan bahwa konsep etika politik DPD partai Golkar Kotim, secara keseluruhan Golkar mengatur AD/ART. Konsepnya adalah ikut mengatur masalah pembangunan daerah dan sumber daya masyarakatnya yang sesuai dengan Pancasila dan HUD 1945. Sejauh ini pelaksanaan etika politik Golkar, seperti yang diungkapkan para pengusaha tidak ada istilah oposisi untuk partai Golkar. Partai Golkar menjadi orang yang bermitra dengan kepala daerah bahkan sekali-sekali bisa menjadi duta Kepala Daerah dalam masalah pembangunan, tetapi tetap kritis. Apabila tidak sesuai dengan apa yang menjadi komitmen

Pemerintah harus dikrtisi. Untuk pelaksanaan etika politik DPD Golkar Kotim kepada masyarakat sejauh ini, sesuai dengan bidang kami, yang ditugaskan di DPR yaitu bajad anggaran registrasi dan pengawas. Maka kami memperjuangkan hak–hak masyarakat dan aspirasi–aspirasi masyarakat sesuai dengan aturan atau mekanisme yang ada.

Hal ini berarti bahwa Contoh kongkrit etika politik DPD Golkar dengan Kepala Daerah. sesuai , mekanisme yang ada. bila ada rencana Pemerintah seperti rapat badan anggaran , rapat paripurna dll, akan dibahas. Sehingga keinginan pemerintah tidak harus diterima sepenuhnya. Kalau itu baik untuk masyarakat atau daerah kita dukung tetapi, kalau itu tidak baik untuk masyarakat atau daerah maka dipertimbangkan bahkan ditolak.

Beliau juga mengatakan bahwa partai Golkar di Kotim ini bisa terus maju dan bertahan lama di reteng atas, karena Golkar terus dan tetap mengedepankan tugas untuk memperjuangkan hak–hak, aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Jadi, masyarakat melihat dan menilai sendiri kalau partai maupun orang Golkar memperjuangkan mereka. Golkar meyakinkan kalau mereka berjuang untuk masyarakat bahkan saat Golkar turun pun misalnya pada tahun 1999, Golkar tetap memperjuangkan masyarakat karena Golkar tetap ingin memperjuangkan pembangunan daerah.

Wawancara pada tanggal 30 Mei 2013 kepada Edi Sabarudin S.Sos sebagai Wakil Ketua Pendidikan dan Pelatihan kadar DPD Golkar

Kotawaringin Timur Propinsi Kal-Teng tentang etika politik perspektif DPD GOLKAR Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah yaitu : Beliau menyatakan bahwa DPD partai Golkar mempunyai Yang namanya Panca Sukses Golkar yaitu yang terdiri dari :

Beliau menyatakan konsep etika politik DPD Partai Golkar Kotim, sebagai partai politik memposisikan diri dari sisi bagaimana partai politik menjadi media sosialisasi politik, kebijakan-kebijakan kepada masyarakat. Partai Golkar semaksimal mungkin dalam hal menjadi media pendidikan politik dan sebagai media untuk menyerap aspirasi.

Beliau menjelaskan bahwa Secara spesifik etika politik partai Golkar pada prinsipnya ingin mengembangkan fungsi dan peran partai politik itu yang ingin dibangun. Pelaksanaan etika politik DPD Golkar Kotim dengan Kepala Daerah. Sejauh ini tetap eksis berkomunikasi politik dengan semua kalangan, memegang kebijakan public dan Kepala Daerah. Kalau ada kebijakkan hal – hal yang sifatnya kritis maka disikapi atau diatasi akan tetapi, kalau berpihak pada masyarakat maka didukung sesuai dengan prinsip DPD Golkar Kotim dalam fisinya yaitu kritis, objektif dan professional.

Golkar berusaha untuk menempatkan sebagaimana tempatnya. misalnya tidak membabi buta menolak kebijakan politik eksekutif karena bukan partai pemenang pada saat pilkada tetapi sesuai prinsip. Sedangkan etika politik DPD Golkar kotim dengan masyarakat sejauh ini

tetap pada prinsip-prinsip partai Golkar yaitu menerima masukan-masukan dengan cara menyelenggarakan kegiatan keagamaan menyelenggarakan kegiatan hari besar nasional, diskusi-diskusi dalam rangka menyerap isi yang berkembang dalam masyarakat tidak dalam internal partai Golkar saja dan terjun langsung ke masyarakat dengan berdiskusi. Beliau juga menyatakan kalau mau percaya diri di kotim Partai Golkar paling aktif yang banyak melakukan peran-peran sosial kemasyarakatan.

Adapun pada tanggal 2 Juni 2013 hasil wawancara kepada Suhartono Firdaus ST, MM sebagai sekretaris DPD Golkar Kotawaringin Timur responden yang mana membahas tentang etika politik perspektif DPD GOLKAR Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah yaitu: Beliau menyatakan bahwa DPD partai Golkar mempunyai Yang namanya Panca Sukses Golkar yaitu yang terdiri dari :

Beliau menyatakan konsep etika politik DPD Golkar Kotim mengacu pada AD/ART partai dan peraturan organisasi yang berlaku di partai Golkar itu sendiri. Pelaksanaan etika politik DPD Golkar Kotim sejauh ini mengacu pada AD/ART, kemudian etika politik itu di implemtasikan dan disebar luaskan melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan kepada kader karena dalam Golkar ada diklat kalau untuk pengurus semacam orientasi komosenaris. Diklat ini dilakukan pada kader dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai pedesaan. Isinya cara etika berpolitik partai Golkar. Kalau untuk pengurus, diawal

kepengurusan baik dari tingkat provinsi sampai pedesaan itu ada yang namanya greantasi fungsionaris partai Golkar.

Beliau menyatakan konsep etika politik DPD Golkar Kotim mengacu pada ADRT partai dan peraturan organisasi yang berlaku di partai Golkar itu sendiri. Pelaksanaan etika politik DPD Golkar Kotim sejauh ini mengacu pada ADRT, kemudian etika politik itu di implemtasikan dan disebar luaskan melalui pendidikan dan pelatihan–pelatihan kepada kader karena dalam Golkar ada diklat kalau untuk pengurus semacam oreantasi komosenaris. Diklat ini dilakukan pada kader dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai pedesaan. Isinya cara etika berpolitik partai Golkar. Kalau untuk pengurus, diawal kepengurusan baik dari tingkat provinsi sampai pedesaan itu ada yang namanya greantasi fungsionaris partai Golkar.

Hasil yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2013 wawancara kepada Dra. Marta Ujai sebagai Wakil Ketua DPD Golkar Kotawaringin Timur Propinsi Kal-Teng dengan para responden yang mana membahas tentang etika politik perspektif DPD GOLKAR Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah Beliau menyatakan bahwa DPD partai Golkar mempunyai Yang namanya Panca Sukses Golkar.

Beliau menyatakan etika politik partai Golkar itu ialah memperkenalkan Golkar itu kepada masyarakat, kita berupaya menanamkan kepada masyarakat, kita untuk berpolitik yang benar pelaksanaanya selama ini kita menjalaninya baik dari pemilu pertama

sampai sekarang dengan cara memperkenalkan calon–calon kita kepada masyarakat. Cara menyampaikannya dengan masyarakat bagaimana etika politik partai Golkar itu melalui pertemuan, kegiatan, perlombaan yang diadakan oleh partai Golkar. Pada saat pertemuan silaturahmi ke Kecamatan, kita memperkenalkan kepada masyarakat untuk berpolitik yang benar seperti kalau mau memilih suatu pemimpin itu jangan melihat uangnya tapi liat kualitas orangnya yang akan nanti mampu menyampaikan aspirasi masyarakat. Cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai Golkar dengan cara memberitahukan mereka bahwa apa yang sudah dibuat partai Golkar dari dulu sampai sekarang ialah dengan cara menjaga kepercayaan masyarakat dan partai Golkar ingin membuktikan bahwa mereka memang berjuang untuk kepentingan rakyat. Contoh penerapan etika politik terhadap kader–kader nya itu dengan cara pendidikan politik, orientasi agar tertanam dalam dirinya. Cara berpolitik yang benar dan agar menanamkan kesetiaannya terhadap partai Golkar baik ketika dia diuntungkan maupun ketika dirugikan. Orientasi itu adalah salah satu syarat untuk perencanaan.

Melihat dari bagaimana etika politik DPD Golkar terhadap kepada Daerah dan masyarakat serta konsistennya para kader Golkar tersebut. Dalam mengimplementasikan apa yang sudah diwajibkan oleh partai diatas. Maka tidak menutup kemungkinan hal tersebut lah yang membuat partai Gokar di Kotim terus menerus mengalami masa kejayaan.

2. Tinjauan Politik Islam Tentang Etika Berpolitik Menurut DPD GOLKAR Kotawaringin Timur Kalimantan tengah.

Wawancara yang dilakukan pada tanggal 9 Juni 2013 kepada ketua DPD Golkar tentang Politik Islam secara plural dalam proses berpolitik terutama yang berhubungan dengan etika yang diharapkan oleh partai golkar beliau mengatakan bahwa dasarnya sudah diterapkan di Kotawaringin Kalimantan Tengah namun tidak sepenuhnya dikarenakan keberagaman agama yang terjadi di lingkup organisasi tersebut tidak semua orang Islam sehingga harus saling menelaraskan satu sama lain agar dapat berjalan dengan baik. Namun bagi penganut Islam mereka melaksanakan etika berpolitik tersebut menurut agama Islam yaitu tidak saling menjelekkkan satu sama lain dan tidak saling bebenturan dengan agama.

Menurut beliau bahwa dewasa ini ada dua pola utama dalam memahami hubungan antara Islam dengan politik. Pertama, para elit politik meletakkan Islam dibawah praktek politik, sebagaimana pernah diterapkan Kemal Attaruk di Turki. Kemal menerapkan sistem politik etalisme, yang dalam prakteknya meletakkan semua persoalan yang menyangkut agama, baik langsung atau tidak langsung berada dibawah kendali politik negara. Konsep rekayasa sosialnya yang kemudian dikenal dengan istilah westernisasi, yang lahir dari rasa kekagumannya dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh negara-negara Barat, baik

dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, politik maupun sosial budaya.

Hasil wawancara kepada beliau yang tergambar dalam ungkapan beliau yaitu Dampak negatif itu pun masih dirasakan sampai sekarang ini, dimana kita menemukan cara-cara orang melakukan pembedaan (spesialisasi) yang didasarkan atas agama dan yang bukan agama. Sebagai contoh, pembangunan telah menjadi kata yang sangat menjanjikan, dan menjadi angin segar untuk mengangkat harkat - martabat manusia, dan membebaskan dari derita kemiskinan dan keterbelakangan, serta menjadi impian bagi kalangan masyarakat tertindas. Namun kenyataannya, tidak sedikit keadaan yang memprihatinkan justru dalam suasana dan lingkaran pembangunan- sesuatu yang segalanya mengatasnamakan pembangunan. Sebagian orang mengatakan pembangunan kita telah maju dengan menunjuk adanya kota-kota baru, perumahan mewah, gedung bertingkat dan pencakar langit, penuh dengan warna kebendaan. Akan tetapi disaat yang sama, justru manusia dihindangi rasa keterasingan, bahkan menjadi korban pembangunan itu sendiri. Mereka para pencari keadilan yang tertindas, gelandangan dan pengemis, kaum fakir miskin, yatim piatu dan pengangguran serta kelompok pinggiran, hanya bisa menggigit jari dan tetap tidak terbangunkan dari kenistaan dan deritanya.

Hasil wawancara kepada Adapun hasil pada tanggal 15 Juni 2013 wawancara kepada Dra. Marta Ujai sebagai Wakil Ketua DPD Golkar

Kotawaringin Timur Propinsi Kal-Teng memperjelas bahwa Memperbincangkan persoalan etika politik adalah sesuatu yang sangat penting dalam Islam, karena barbagai alasan, di antaranya; Pertama, politik itu dipandang sebagai bagian dari ibadah, karena itu harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ibadah. Misalnya, dalam berpolitik harus diniatkan dengan lillahi taala. Dalam berpolitik, kita tidak boleh melanggar perintah-perintah dalam beribadah, karena pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ibadah akan dapat merusak “kesucian” politik itu sendiri. Kedua, etika politik dipandang sangat perlu dalam Islam, karena politik itu berkenaan dengan prinsip Islam dalam pengelolaan masyarakat (Irfan Idris: 2009). Dalam berpolitik sering menyangkut hubungan antar-manusia, misalnya saling menghormati, saling menghargai hak orang lain, saling menerima dan tidak memaksakan pendapat sendiri. Itulah menurut hemat saya prinsip-prinsip hubungan antar-manusia yang harus berlaku di dalam dunia politik kita saat ini.

Hasil wawancara pada tanggal 17 Juni 2013 kepada Suhartono Firdaus ST, MM sebagai sekretaris DPD Golkar Kotawaringin Timur tentang tinjauan politik Islam tentang etika berpolitik singkat beliau mengatakan bahwa yang terjadi di tempat tersebut adalah mereka harus mempunyai kemampuan berpolitisi harus memiliki watak merpati yang lemah lembut dan penuh kemuliaan dalam memperjuangkan idealisme. Tetapi, di sisi lain terkadang ia juga mempunyai watak ular yang licik dan jahat, serta selalu berupaya untuk memangsa merpati. Akan tetapi

celakanya, yang sering menonjol dimiliki oleh insan politik adalah “watak sisi ular” ketimbang watak “ sisi merpati”-nya. Dari sikap itu sehingga memunculkan pemikiran bahwa politik itu kotor, akal-akal-an, tipu muslihat, licik, serta kejam dalam mencapai suatu tujuan, dan anggapan ini hingga kini masih dianut oleh sebagian bahkan mayoritas orang, dan tentunya hal ini mencederai pengertian politik itu sendiri yang padahal menurut filosof Aristoteles bahwa politik itu sendiri justru bertujuan mulia. Di sinilah pentingnya etika politik sebagai alternative solusi pilihan untuk mewujudkan perilaku politik yang santun demi terwujudnya kondisi Negara yang tentram, aman dan maju.

Hasil wawancara pada tanggal 19 Juni 2013 kepada pimpinan DPD Golkar tentang kondisi penerapan etika politik di sekarang ini terjadi di Kotawarigin barat beliau menjelaskan bahwa Jika kita perhatikan semenjak era reformasi yang serba boleh ini, kemunduran etika politik para elite dalam setiap jejak perjalanannya membuat kita menjadi “miris”. Kemunduran etika politik para elite ini salah satunya ditandai dengan menonjolnya sikap pragmatisme dalam perilaku politik yang hanya mementingkan individualisme dan kelompoknya saja. Kepentingan bangsa, menurut mereka bisa dibangun hanya melalui kelompoknya. Dan masing-masing kelompok berpikir demikian.

Hasil wawancara kepada Sekeretaris DPD Golkar pada tanggal 20 Juni 2013 tentang cara pandang mereka terhadap proses politik Islam yang harus dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari, kata “etika” sering

disamakan dengan “akhlak”, akan tetapi ada sebagian ahli membedakannya. Misalnya Ahmad Amin, dalam Kitab al- Akhlaq mendefinisikan akhlak sebagai “ilmu yang menyelidiki segala perbuatan manusia kemudian menetapkan hukum baik dan buruk.” Beliau menjelaskan mengemukakan bahwa akhlak adalah “sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang menimbulkan bermacam macam pola laku secara spontan dan mudah; tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.” Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh kedua ahli ini terdapat kesamaan antara etika dan akhlak, yaitu sama-sama membahas kriteria baik dan buruk (right and wrong).

Dari uraian di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa politik adalah kegiatan dalam suatu system politik atau Negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari system tersebut dan bagaimana melaksanakan tujuannya. Dan Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Dari definisi di atas, kegiatan berpolitik terkait dengan Kekuasaan yaitu kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok sesuai dengan keinginan dari pelaku. Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan diuraikan beberapa definisi ilmu politik menurut beberapa tokoh.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pengertian etika politik mengandung tiga tuntutan, pertama, upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain; kedua, upaya memperluas lingkup kebebasan..., ketiga,

membangun institusi-institusi yang adil. Tiga tuntutan itu saling terkait. “Hidup baik bersama dan untuk orang lain” tidak mungkin terwujud kecuali bila menerima pluralitas dan dalam kerangka institusi-institusi yang adil. Hidup baik tidak lain adalah cita-cita kebebasan: kesempurnaan eksistensi atau pencapaian keutamaan. Institusi-institusi yang adil memungkinkan perwujudan kebebasan dengan menghindarkan warganegara atau kelompok-kelompok dari saling merugikan. Sebaliknya, kebebasan warganegara mendorong inisiatif dan sikap kritis terhadap institusi-institusi yang tidak adil. Etika politik tidak hanya menyangkut perilaku individual saja, tetapi terkait dengan tindakan kolektif (etika sosial).

Hasil wawancara kepada wakil ketua DPD tentang apa sebenarnya tujuan Etika Politik, beliau mengatakan bahwa pada dasarnya Etika, atau filsafat moral yang diketahui mempunyai tujuan menerangkan kebaikan dan kejahatan. Etika politik dengan demikian, memiliki tujuan menjelaskan mana tingkah laku politik yang baik dan sebaliknya. Apa standar baik? Apakah menurut agama tertentu? Bisa iya, bisa juga tidak! Tapi yang penting adalah standar baik dalam konteks politik adalah bagaimana politik diarahkan untuk memajukan kepentingan umum. Jadi kalau politik sudah mengarah pada kepentingan pribadi dan golongan tertentu, itu etika politik yang buruk. Sayangnya, itulah yang terjadi di negeri kita tercinta ini.

Dalam etika individual, kalau orang mempunyai pandangan tertentu bisa langsung diwujudkan dalam tindakan. Sedangkan dalam etika politik, yang merupakan etika sosial, untuk dapat mewujudkan pandangannya dibutuhkan persetujuan dari sebanyak mungkin warga Negara karena menyangkut tindakan kolektif. Maka hubungan antara pandangan hidup seseorang dengan tindakan kolektif tidak langsung, akan tetapi membutuhkan perantara. Perantara ini berfungsi menjembatani pandangan pribadi dengan tindakan kolektif. Perantara itu bisa berupa simbol-simbol maupun nilai-nilai: simbol-simbol agama, demokrasi, dan nilai-nilai keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan sebagainya. Melalui simbol-simbol dan nilai-nilai itu, politikus berusaha meyakinkan sebanyak mungkin warga negara agar menerima pandangannya sehingga mendorong kepada tindakan bersama. Maka politik disebut seni karena membutuhkan kemampuan untuk meyakinkan melalui wicara dan persuasi, bukan manipulasi, kebohongan, pengkhianatan dan kekerasan. Etika politik akan kritis terhadap manipulasi atau penyalahgunaan nilai-nilai dan symbol-simbol itu. Ia berkaitan dengan masalah struktur sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang mengkondisikan tindakan kolektif. Tuntutan pertama etika politik adalah “hidup baik bersama dan untuk orang lain”. Pada tingkat ini, etika politik dipahami sebagai perwujudan sikap dan perilaku politikus atau warganegara. Politikus yang baik adalah jujur, santun, memiliki integritas, menghargai orang lain, menerima pluralitas, memiliki

keprihatinan untuk kesejahteraan umum, dan tidak mementingkan golongannya. Jadi, politikus yang menjalankan etika politik adalah negarawan yang mempunyai keutamaan-keutamaan moral. Dalam sejarah filsafat politik, filsuf seperti Socrates sering dipakai sebagai model yang memiliki kejujuran dan integritas. Politik dimengerti sebagai seni yang mengandung kesantunan. Kesantunan politik diukur dari keutamaan moral. Kesantunan itu tampak bila ada pengakuan timbal balik dan hubungan fair di antara para pelaku. Pemahaman etika politik semacam ini belum mencukupi karena sudah puas bila diidentikkan dengan kualitas moral politikus. Belum mencukupi karena tidak berbeda dengan pernyataan. “Bila setiap politikus jujur, maka Indonesia akan makmur”. Dari sudut koherensi, pernyataan ini sah, tidak terbantahkan. Tetapi dari teori korespondensi, pernyataan hipotesis itu terlalu jauh dari kenyataan (hipotetis realis). Etika politik, yang hanya puas dengan koherensi norma-normanya dan tidak memperhitungkan real politik, cenderung mandul. Namun bukankah real politik, seperti dikatakan Machiavelli, adalah hubungan kekuasaan atau pertarungan kekuatan? Masyarakat bukan terdiri dari individu-individu subjek hukum, tetapi terdiri dari kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan yang saling berlawanan. Politik yang baik adalah politik yang bisa mencapai tujuannya, apa pun caranya. Relevansi etika politik terletak pada kemampuannya untuk menjinakkan kekuatan itu dan mengatur kepentingan-kepentingan kelompok dengan membangun institusi institusi

yang lebih adil. Beberapa prinsip ajaran Islam yang dapat dijadikan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini antara lain meliputi kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, prinsip keadilan sosial, prinsip persamaan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia, prinsip peradilan bebas kepentingan, prinsip perdamaian dan keselamatan, prinsip kesejahteraan, prinsip ketaatan rakyat.

C. Analisis Data

1. Perspektif DPD Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah tentang Etika Berpolitik

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas bahwa konsep etika politik pada prinsipnya dari DPD GOLKAR yaitu Konsep etika politik yang mengacu kepada acuan AD/ART DPD GOLKAR dan peraturan organisasi yang berlaku di partai Golkar itu sendiri. Maka kemudian etika politik itu di implemtasikan dan disebar luaskan melalui pendidikan dan pelatihan–pelatihan kepada kader-kadar Golkar. Diklat ini dilakukan pada kader-Kadaer dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai pedesaan. Sejauh ini pelaksanaan etika politik DPD GOLKAR Kotim pelaksanaan politik partai golkar dapat terlihat setelah kader mendapat diktat-diklat dari DPD GOLKAR maka kader itu minimal mempraktekkan dalam kehidupannya sehari–hari magaimana berpolitik yang baik.

Menurut pendapat Sekretaris DPD Golkar bahwa konsep politik dalam islam (demokrasi adalah musuh islam). Prinsip-prinsip islam berlawanan dengan prinsip-prinsip demokrasi, diantaranya: Pertama, kekuasaan hanya milik Allah dan bukan milik rakyat. Kedua, hukum yang sah berlaku hanyalah hukum Allah dan rosulNya, walaupun bertentangan dengan mayoritas rakyat. Ketiga, tidak boleh tunduk kepada suara mayoritas, tetapi hanya tunduk kepada hukum Allah “Pengertian demokrasi adalah kedaulatan itu di tangan rakyat. Implikasinya hak membuat hukum ada di tangan rakyat, bukan di tangan Allah. Jika demikian. Maka demokrasi itu bertentangan dengan Islam yang mengakui hak membuat hukum itu hanya milik Allah,” “Dalam sistem demokrasi, yang menang itu tidak selalu benar. Maka syariat Islam bisa kalah, padahal yang banyak itu tidak selalu benar. Saya kira realitas politik mutakhir menampakkan paradoks demokrasi itu. Bukan yang paling baik dan paling benar yang menjadi pemenang,”

Jika peserta pemilu menuhankan kotak suara, meyakini bahwa kedaulatan sepenuhnya ditangan rakyat, bukan di tangan Tuhan. Menyekutukan Tuhan dalam hak membuat hukum adalah kemusyrikan. Barangsiapa menghalalkan sesuatu yang haram maka dia kafir. Para penganut paham demokrasi menganggap rakyat memiliki hak untuk membuat hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Atau dengan kata lain meyakini bahwa rakyat tidak wajib berhukum dengan hukum islam. Sedangkan mengikuti pemilu dgn meyakini bahwa pada dasarnya

hak membuat hukum adalah di tangan Allah, dan “terpaksa” mengikuti pemilu (dan proses demokrasi) dengan tujuan menegakkan hukum Allah “semampunya” lewat parlemen, agar kekuasaan tidak jatuh ketangan orang-orang jahat/kafir maka diperbolehkan menurut sebagian ulama dari kalangan ikhwanul muslimin (misalnya Yusuf Al Qardhawi), namun tetap terlarang menurut sebagian ulama salafy (misalnya Syaikh Muqbil bin Hadi Al Wadi’i).

Pada dasarnya, sistem demokrasi, pemilu dan parlemen adalah sistem yang tidak ideal dan tidak sesuai dengan sistem islam. Dan umat islam harus berusaha menghapusnya dan menggantinya dengan sistem khilafah islamiyah. Tetapi sebelum khilafah islamiyah terbentuk, untuk sementara boleh saja berjuang lewat pemilu-parlemen-parpol islam, seperti kata pepatah: tiada rotan akar pun jadi. Sedangkan mendukung partai sekuler maka jelas haram, karena sama saja memusuhi syariat islam. Dalam sistem demokrasi yang meyakini, bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, maka rakyat akan memilih pemimpin sesuai dengan selernya. Jika rakyat suka berjudi, maka mereka akan memilih pemimpin yang mendukung hobi mereka. Jika rakyat suka dangdut, maka ia akan memilih partai yang mendukung dangdut. Jika rakyat hobi pengajian, maka mereka akan memilih partai yang menggalakkan pengajian. Karena ingin meraih suara rakyat itulah, ada partai yang mempunyai program seperti “tong sampah”. Apa saja diadakan, yang penting dapat dukungan.

Socrates, seperti diceritakan muridnya, Plato (427-347 SM), dalam karyanya *The Republic*, memandang demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang tidak ideal; lebih rendah nilainya dibandingkan aristokrasi (negara dipimpin para pecinta hikmah/kebenaran), ‘timokrasi’ (negara dipimpin para ksatria pecinta kehormatan), dan oligarchi (negara dipimpin oleh sedikit orang). Di negara demokrasi (pemerintahan oleh rakyat – *the rule of the people*), kata Socrates, semua orang ingin berbuat menurut kehendaknya sendiri, yang akhirnya menghancurkan negara mereka sendiri. Kebebasan menjadi sempurna. Ketika rakyat lelah dengan kebebasan tanpa aturan, maka mereka akan mengangkat seorang tiran untuk memulihkan aturan. (... when men tire of the lawlessness of a liberty... they appoint a strong man to restore order). Tapi nampaknya socrates salah, buktinya Amerika oke2 aja tuh kliatannya... Intinya adalah: menegakkan syariat islam itu wajib, dan sekulerisme itu haram.

Wahai kaum Muslim, Slogan demokratisasi ternyata mengandung muatan kepentingan negara besar pengemban ideologi kufur sekulerisme kapitalisme. Banyak sekali slogan dan wajah manis yang disajikan di hadapan kita. Sekilas nampak baik, tapi sebenarnya hanyalah tipuan belaka. Karenanya, waspadalah dalam mensikapi berbagai slogan dan propaganda serta aktivitas kaum imperialis di dunia Islam. Allah SWT mengingatkan kita dalam firman-Nya: “

Telah nampak kebencian dari mulut-mulut mereka, dan apa yang disembunyikan di dada mereka lebih besar (TQS. Ali Imran[3]:118).

Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia, termasuk tentang negara dan politik. Politik (siyasah) adalah pemeliharaan urusan umat (ri'ayatu syuunil ummah), dalam dan luar negeri. Pelaksana praktisnya adalah daulah (negara). Sedangkan umat melakukan muhasabah (kritik, saran, dan nasihat) kepada daulah (khalifah). Politik dalam negeri dilaksanakan negara untuk memelihara urusan umat dengan melaksanakan mabda (aqidah dan peraturan-peraturan) Islam di dalam negeri. Politik luar negeri dilakukan daulah untuk memelihara urusan umat di luar negeri dengan menjalin hubungan internasional dan menyebarkan mabda Islam ke seluruh dunia (lihat Mafahim Siyasiyah lihizbi Tahrir, An Nabhani hal. 1).

Umat Islam wajib menyibukkan diri dalam menggeluti masalah-masalah politik internasional maupun regional sehingga paham akan fakta politik yang sedang terjadi dan mampu mengambil sikap berdasarkan mabda Islam, untuk memelihara kepentingan umat dan daulah baik di dalam maupun di luar negeri. Rasulullah saw bersabda : “Siapa saja yang bangun pagi-pagi dan tidak memperhatikan urusan (kepentingan) kaum muslimin, maka ia tidak termasuk golongan mereka (kaum muslimin)”

Ibnu Abi Hatim mengeluarkan hadits dari Ibnu Syihab yang mengatakan bahwa kaum musyrikin Quraisy di Makkah mendebat kaum muslimin dalam konfrontasi mereka dengan mengemukakan kasus kekalahan Rum (ahli Kitab) atas Persia (Majusi musyrik). Mereka mengatakan, “Kalian mengklaim bahwa kalian akan mengalahkan kami

dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi kalian. Mengapa orang-orang Majusi mengalahkan orang-orang Rum padahal orang Rum itu ahli kitab. Jadi kami akan mengalahkan kalian sebagaimana Persia mengalahkan Romawi.” Lalu Allah menurunkan ayat: “Alif Lam Mim. Telah dikalahkan bangsa Rumawi di negeri yang terdekat. Dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi...” (QS. Ar Rum 1-4). Hal ini menunjukkan bahwa kaum muslimin di Mekkah selalu terlibat dalam “perang urat syaraf” dengan kaum kafir Quraisy dalam membahas perkembangan hubungan internasional.

Dalam menggeluti politik dalam negeri, kaum muslimin wajib selalu memperhatikan pelaksanaan pemerintahan kaum muslimin dan meluruskannya jika terjadi penyimpangan. Dalam suatu hadits Rasulullah bersabda: “Siapa saja yang melihat penguasa yang zalim dengan menghalalkan apa yang diharamkan Allah, mengingkari janji Allah, menyalahi sunnah Rasul, memperkosa hak-hak hamba Allah, lalu tidak mengubahnya dengan perkataan ataupun perbuatan, maka pasti Allah akan menempatkannya di tempat penguasa zalim itu (di akhirat)” (HR. Ibnu Katsir, lihat, Abdul Aziz Al Badri, Ulama dan Penguasa, hal 45).

Islam mewajibkan berdirinya partai politik yang berjuang untuk Islam dengan tugas menyebarkan dakwah Islam kepada orang-orang kafir di seluruh dunia dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk kepada penguasa. Firman Allah SWT.:

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada al khair (dinul Islam) menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar” (QS. Ali Imran 104).

Berbeda dengan sistem demokrasi, khususnya demokrasi liberal, dalam Islam tak ada parpol pemerintah (penguasa) dan parpol oposisi. Dalam Islam, kekuasaan itu terletak di satu tangan, yaitu kepala negara atau khalifah. Khalifah, sebagai penguasa tunggal, berhak mengangkat perangkat negara untuk menjalankan pemerintahan. Jadi dalam Islam, para politikus yang aktif dalam partai politik tidak berarti terlibat dalam kekuasaan (walau ini bisa menjadi tangga menuju jenjang kekuasaan apabila dipilih menjadi khalifah atau diangkat menjadi pejabat). Namun para politikus punya tugas besar bersama partainya, yaitu amar ma’ruf nahi mungkar termasuk muhasabah kepada penguasa agar urusan kepentingan umat tetap terpelihara.

Terdapat tiga pendapat di kalangan pemikir muslim tentang kedudukan politik dalam syariat Islam. Yaitu :

1. kelompok yang menyatakan bahwa Islam adalah suatu agama yang serbah lengkap didalamnya terdapat pula antara lain system ketatanegaraan atau politik. Kemudian lahir sebuah istilah yang disebut dengan fikih siasah (system ketatanegaraan dalam islam) merupakan bagian integral dari ajaran islam. Lebih jauh kelompok ini berpendapat bahwa system ketatanegaraan yang harus diteladani adalah system yang

telah dilaksanakan oleh nabi Muhammad SAW dan oleh para khulafah al-rasyidin yaitu sistem khilafah.

2. kelompok yang berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat. Artinya agama tidak ada hubungannya dengan kenegaraan. Menurut aliran ini nabi Muhammad hanyalah seorang rasul, seperti rasul-rasul yang lain bertugas menyampaikan risalah Tuhan kepada segenap alam. Nabi tidak bertugas untuk mendirikan dan memimpin suatu Negara.
3. menolak bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap yang terdapat didalamnya segala sistem ketatanegaraan, tetapi juga menolak pendapat bahwa Islam sebagaimana pandangan Barat yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.

Sejarah membuktikan bahwa nabi kecuali sebagai rasul, meminjam istilah Harun Nasution, kepala agama, juga beliau adalah kepala negara. Nabi menguasai suatu wilayah yaitu Yastrib yang kemudian menjadi Madinah Al-Munawwarah sebagai wilayah kekuasaan nabi sekaligus menjadi pusat pemerintahannya dengan piagam Madinah sebagai aturan dasar kenegaraannya. Sepeninggal nabi, kedudukan beliau sebagai kepala negara digantikan Abu Bakar yang merupakan hasil kesepakatan tokoh-tokoh sahabat, selanjutnya disebut khalifah. Sistem pemerintahannya disebut "khalifah". Sistem "khalifah" ini berlangsung

hingga kepemimpinan berada dibawah kekuasaan khalifah terakhir, ali “karramah allahu wajhahu”.

Demokrasi dalam Islam pada dasarnya adalah kedaulatan mutlak dan keesaan tuhan yang terkandung dalam konsep tauhid dan peranan manusia yang terkandung. Dalam konsep khalifah memberikan kerangka yang dengannya para cendikiawan belakangan ini mengembangkan teori politik tertentu yang dianggap demokratis. Didalamnya tercakup definisi khusus dan pengakuan terhadap kedaulatan rakyat, tekanan pada kesamaan derajat, manusia, dan kewajiban rakyat sebagai pengemban pemerintahan.

Demokrasi islam dianggap sebagai sistem yang mengekuhkan konsep-konsep islam yang sudah lama berakar, yaitu musyawarah {syura}, persetujuan {ijma’}, dan penilaian interpretative yang mandiri {ijtihad}.

Musyawah, konsensus, dan ijtihad merupakan konsep-konsep yang sangat penting bagi artikulasi demokrasi islam dalam kerangka keesaan tuhan dan kewajiban-kewajiban manusia sebagai khalifah-Nya. Meskipun istilah-istilah ini banyak diperdebatkan maknanya, namunlepas dari ramainya perdebatan maknanya didunia Islam, istilah-istilah ini memberi landasan yang efektif untuk memahami hubungan antara islam dan demokrasi di dunia kontemporer.

Islam mengandung ajaran yang berlimpah tentang etika dan moralitas kemanusiaan, termasuk etika dan moralitas politik. Karena itu, wacana politik tidak bisa dilepaskan dari dimensi etika dan moralitas. Melepaskan politik dari gatra moral-etis, berarti mereduksi Islam yang

komprehensif dan mencabut akar doktrin Islam yang sangat fundamental, yakni akhlak politik. Dengan demikian, muatan etika dalam wacana politik merupakan keniscayaan yang tak terbantahkan.

Al-Mawardi, ahli politik Islam klasik terkemuka (w.975 M) merumuskan syarat-syarat seorang politisi sebagai berikut: Bersifat dan berlaku adil, Mempunyai kapasitas intelektual dan berwawasan luas., Profesional., Mempunyai visi yang jelas, Berani berjuang untuk membela kepentingan rakyat.

Politik dalam Islam menjuruskan kegiatan umat kepada usaha untuk mendukung dan melaksanakan syari'at Allah melalui sistem kenegaraan dan pemerintahan. Ia bertujuan untuk menyimpulkan segala sudut Islam yang syumul melalui satu institusi yang mempunyai syakh siyyah untuk menerajui dan melaksanakan undang undang.

Pengertian ini bertepatan dengan firman Allah yang mafhumnya: "Dan katakanlah: Ya Tuhan ku, masukkanlah aku dengan cara yang baik dan keluarkanlah aku dengan cara yang baik dan berikanlah kepadaku daripada sisi Mu kekuasaan yang menolong." (Al Isra': 80).

Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradap, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Karena itu didalam ilmu filsafat, sejak filsafat Yunani sampai masa filsafat Islam juga dikenal istilah madinah atau polis, yang berarti kota yaitu masyarakat yang maju dan berperadaban.

Masyarakat Madinah menjadi simbol idealisme yang diharapkan oleh setiap masyarakat.

2. Tinjauan Politik Islam Tentang Etika Berpolitik Menurut Pandangan DPD Golkar

Berdasarkan hasil analisis bahwa tinjauan politik Islam tentang etika berpolitik pada dasarnya sangat menjunjung tinggi perilaku yang dapat memberikan hasil yang baik kepada para penganut berpolitik. Adanya pihak yang memahami bahwa ajaran Islam menjadi sumber nilai segala perilaku dan tindakan penganut yang meyakinkannya. Jaminan keaslian wahyu Allah SWT menjadi alasan utama dalam wacana ini. Berbeda dengan ajaran agama lain, Islam menggariskan ajarannya pada tingkat syariah yang merupakan panduan praktek perilaku saleh, yaitu suatu ajaran yang menggariskan perilaku politik yang mengarah kepada pelaksanaan norma-norma ajaran yang diberikan Allah kepada manusia. Karenanya setiap pribadi muslim dalam menjalankan perilaku politiknya semestinya merujuk kepada petunjuk syariah ini.

Hasil pandangan mereka bahwa di dalam Islam, politik dan kekuasaan bukan barang terlarang, melainkan dianjurkan sejauh dapat menjalankan visi-misi kehambaan dan kepemimpinan. Dengan politik dan kekuasaan, tugas pemimpin dapat dijalankan lebih kongkret dan efektif. Bahkan politik dan kekuasaan, merupakan instrumen

atau media paling efektif untuk berdakwah dan menegakkan pesan-pesan Islam.

DPD Golkar memandang bahwa pembangunan pada hakikatnya adalah usaha meningkatkan taraf hidup manusia ketingkat yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih enak, lebih tentram, dan lebih menjamin keberlangsungan hidup di masa depan. Islam dengan ajaran yang dikandungnya bertujuan mewujudkan kesejahteraan/kemaslahatan hidup. Kesejahteraan umat manusia yang dituju Islam adalah *comprehensive human justice*, yaitu sikap dan prilaku adil, dan keadilan adalah kesejahteraan dalam arti seutuhnya, bukan keadilan dalam arti ekonomi semata (*economic justice*).

Umar Sebaliknya, apa yang ditunjukkan oleh para elit politik kita masa ini, tidak lebih dari sebuah prilaku yang belum mendudukkan etika agama dalam praktek politiknya. Padahal mayoritas pelaku kebijakan dari pemerintahan adalah orang-orang yang beragama (Islam). Namun kekuasaan dijalankan hanya sebatas kepentingan sekelompok orang (partai), belum menyeluruh kepada kepentingan rakyat secara nasional. Ambisi akan kemenangan dalam sebuah kompetisi merebut kursi kepemimpinan pada periode berikutnya (2014), di atas kepentingan bangsa, akan berujung kepada ketidakpercayaan rakyat.

Politik Islam adalah aktifitas politik yang didasari oleh nilai/prinsip Islam tersebut di atas, baik dari titik tolak (*starting point*), program, agenda, tujuan, sarana dan lainnya harus sesuai dengan

petunjuk Islam. Oleh karenanya, di lapangan, politik Islam harus tampil beda dengan politik non-Islam. Jika politik konvensional bisa menggunakan cara apa saja untuk mencapai tujuannya, maka politik Islam tidak boleh demikian. Ada variabel lain yang harus diperhatikan, seperti etika Islam, ketentuan hukum Islam dll. Bukankah dalam kitab suci al-Qur'an sendiri, Allah mengatakan dalam Surat At-Tin dengan istilah *asfalas safilin*, lebih rendah ketimbang binatang. Manusia bisa terjerembab pada level itu. Karenanya, kita harus selalu waspada, berjihad melawan hawa nafsu. Jangan sampai larut dan terhanyut pada apa yang Pujangga Ranggawarsita sebut sebagai "zaman edan".

Persoalan etika politik adalah sesuatu yang sangat penting dalam Islam, karena berbagai alasan. Pertama, politik itu dipandang sebagai bagian dari ibadah, karena itu harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ibadah. Misalnya, dalam berpolitik harus diniatkan dengan *lillahi taala*. Dalam berpolitik, kita tidak boleh melanggar perintah-perintah dalam beribadah, karena pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ibadah dapat merusak "kesucian" politik.

Kedua, etika politik dipandang sangat perlu dalam Islam, karena politik itu berkenaan dengan prinsip Islam dalam pengelolaan masyarakat. Dalam berpolitik sering menyangkut hubungan antarmanusia, misalnya saling menghormati, saling menghargai hak orang lain, saling menerima dan tidak memaksakan pendapat sendiri.

Itulah prinsip-prinsip hubungan antarmanusia yang harus berlaku di dalam dunia politik.

Kecuali itu, keberadaan masyarakat dan negara merupakan hal yang sangat penting dan mutlak dalam Islam. Karena itu, beberapa para ahli fikih politik Islam mengemukakan adalah suatu kewajiban bagi orang Islam untuk mendirikan negara. Dengan adanya negara bisa diciptakan sebuah keteraturan kehidupan masyarakat yang baik, sehingga pada gilirannya umat Islam bisa menyelenggarakan ibadah-ibadahnya dengan baik pula.

Bila hubungan antarmasyarakat dan penyelenggaran negara tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, maka yang akan muncul adalah kekacauan dan muncul anarki yang sangat dikecam oleh para ulama. Kekacauan dan anarki dalam suatu masyarakat dan negara dapat mengganggu penyelenggaraan ibadah.

Selama beberapa tahun sepeninggal Rasulullah, umat Islam mengalami beberapa model kepemimpinan, antara lain, kepemimpinan model khilafah dan dinasti.

Realitas politik dan adanya semangat teologi Islam tersebut mendorong para filosof dan para ahli etika politik Islam untuk membuat aturan-aturan pemilihan seorang pemimpin pemerintahan demi terwujudnya negara ideal dalam beberapa karya tulis. Misalnya, Al-Farabi dalam karyanya, *Al-Madiinah Al-Faadhilah*, Ibnu Maskawih dalam bukunya *Tahziib Al-Akhlak*, dan Al-Mawardi dalam karyanya *Al-*

Ahkaam Al-Shultaaniyah. Ini artinya, para pemikir Islam menyadari betapa Islam memperhatikan dalam menciptakan dan mengembangkan negara ideal.

Memasuki abad 20 ini, umat Islam tetap dan terus dituntut untuk mendirikan sebuah negara ideal. Untuk merealisasikan tuntutan itu, umat Islam dihadapkan pada beberapa pilihan sistem politik, antara lain demokrasi. Demokrasi merupakan salah satu mekanisme untuk memilih seorang pemimpin. Meskipun beberapa negara Islam telah menjalankan proses demokrasi, dan belum berhasil, tetapi mekanisme demokrasi tetap diandalkan sebagai mekanisme yang baik. Sebab, di dalam mekanisme demokrasi terdapat sistem check and balance-nya, memperkuat civil society, mewujudkan good governance, taushiyah, dan lain yang, selalu berproses dan membutuhkan kesabaran, ketangguhan, dan lainnya untuk bisa maju ke depan.

Karena itulah maka sesuai dengan prinsip Islam, kita harus melakukan taushiyah bi al-haq wa bi al-shabr (saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran). Apalagi pada masa sekarang, ada kecendrungan di dalam dunia politik kita, bahwa kita sering kehilangan kesabaran, yang bisa dalam bentuk tindakan anarkis, golput, tidak mau memilih dalam pemilu. Hal-hal tersebut menggambarkan realitas jahiliyah dalam politik kita.

Sebagaimana ayat di atas, al Maraghi menafsirkannya bahwa manusia seharusnya tidak mengabaikan petunjuk Allah dan menukarnya

dengan hal yang sepele (kekuasaan). Juga bila cara-cara tercela saling mencari aib dan kesalahan terus dilakukan dan dibudayakan, dikhawatirkan wacana dalam kehidupan berdemokrasi, menciptakan masyarakat yang adil dalam kesejahteraan, dan sejahtera dalam keadilan sulit akan terwujud.

Dalam ajarannya, Islam tidak mengenal system kelas (wihdatul insaniyah)^b mengingat kehadirannya didunia adalah pemberi rahmat dan perlindungan serta berkah bagi manusia (rahmatan li al amin) Disini islam memberi ruang yang luas bagi manusia untuk berpartisipasi dalam setiap bidang kehidupan, baik menyangkut hokum, politik, ekonomi, dan lain sebagainya tanpa dibatasi oleh strata social maupun latar belakang budaya.

Dengan ajarannya, Islam sangat menjunjung tinggi keterbukaan dan toleransi. Tanpa memandang latar belakang yang dimilikinya seperti budaya, agama, bangsa dan lain sebagainya, dapat bekerjasama dengan umat Islam tanpa harus mereduksi identitas yang sudah dimiliki.

Menurut mereka Etika Politik Islam sebagai system ajaran agama yang terbuka, Islam selalu menekankan fungsi kritisnya dalam memisahkan sisi kritisnya dalam memisahkan sisi positif dan sisi negatif dari berbagai watak ideologi. Beberapa prinsip Etika politik dalam ajaran Islam yaitu meliputi:

1. Kekuasaan sebagai Amanah
2. Musyawarah
3. Keadilan Sosial

4. Persamaan
 5. Pengakuan dan Perlindungan terhadap HAM
 6. Peradilan bebas
 7. Perdamaian dan keselamatan
 8. Prinsip Kesejahteraan
 9. Prinsip Ketaatan Rakyat
- 